

ABSTRAK

Fikri Puadi Herdiansyah : Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Perkebunan Teh Di Kampung Bunihurip Pada Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembagian bagian daripada sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh pemilik lahan dan petani penggarap di perkebunan teh Kampung Bunihurip Desa Sukapada. Dalam pelaksanaan akad bagi hasil yang ada di kampung Bunihurip terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah sistem bagi hasil yang cenderung merugikan pemilik lahan karena harga perawatan perkebunan teh yang tetap namun harga jual teh yang semakin menurun karena permintaan teh yang juga ikut turun drastis namun petani tetap meminta pembagian sebanyak 50% dari hasil panen teh tersebut. Hal ini terjadi setelah masa pandemi, dimana permintaan teh yang menurun menyebabkan jadwal panen yang biasanya dilakukan satu minggu satu kali menjadi tidak tentu, hal ini juga yang menjadi sebab turunnya harga jual teh dan mengubah sistem pembagian akad bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap menjadi 50% dari setiap kilogram teh yang para petani petik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara akad yang dilakukan sebelumnya dengan realita yang terjadi dilapangan ditinjau dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

Pelaksanaan akad bagi hasil dalam prinsip hukum ekonomi syariah memudahkan Bagi orang yang memiliki modal, akan tetapi tidak memiliki skil dalam memelihara lahan pertanian atau perkebunan atau ada juga orang yang mempunyai modal dan mempunyai keahlian, akan tetapi tidak semua mempunyai waktu dan sebaliknya. Ada juga mereka yang tidak dapat memproduksi hartanya. Maka Islam menjejurkan untuk memberikan modal (dana) kepada yang membutuhkan modal demi kelancaran usaha mereka. Macam-macam akad bagi hasil di bidang pertanian diantaranya adalah *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. Dari ketiga akad diatas, akad yang dilaksanakan di perkebunan teh Kampung Bunihurip adalah akad *Musaqah*.

Perkebunan teh Kampung Bunihurip terletak di Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya. Lahan perkebunan teh seluas 17 hektar tersebut biasa menghasilkan teh sebanyak 6-8 ton setiap minggunya, namun saat ini mereka hanya dapat memanen maksimal 3 ton pucuk teh dalam kurun waktu yang tidak tentu tergantung permintaan pabrik. Sebagian besar masyarakat di Desa Sukapada berprofesi sebagai petani, hal ini juga didukung karena sebagian besar lahan yang ada di Desa Sukapada adalah Lahan Pertanian atau Lahan Produktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fakta dilapangan tentang akad bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap sesuai dengan kaidak akad bagi hasil yang menurut Hukum Ekonomi Syariah. Akad yang dilaksanakan di perkebunan teh ini adalah akad *musaqah*, yaitu dimana pemilik lahan yang sudah memiliki perkebunan teh meminta petani penggarap untuk merawat dan memanen teh yang pemilik lahan miliki.

Pembagian hasil panen yang berubah semenjak masa pandemi dikarenakan oleh permintaan teh yang menurun yang menyebabkan harga jual teh ikut turun, hal ini yang menyebabkan para petani penggarap menginginkan bagian yang lebih besar daripada sebelumnya karena panen yang dilaksanakan pun tidak pasti. Dalam kasus tersebut sebenarnya tidak ada pihak yang bisa disalahkan, namun mereka harus saling *ridha* dalam bekerja maupun dalam memberi. Adapun solusi yang bisa peneliti berikan adalah dengan memanfaatkan daun teh menjadi produk lokal seperti kripik teh dan dipasarkan langsung oleh masyarakat disana, hal ini tentunya dapat meningkatkan pemasukan baik bagi pemilik lahan maupun petani penggarap.

Kata Kunci : Perkebunan Teh, Akad Bagi Hasil, Pandemi Covid-19.

ABSTRACT

Fikri Puadi Herdiansyah: Implementation of Profit Sharing Contracts in Tea Plantations in Bunihurip Village During a Pandemic In the Perspective of Sharia Economic Law

This research is motivated by the division of parts of the profit-sharing system carried out by land owners and smallholders in the tea plantations of Kampung Bunihurip, Sukapada Village. In the implementation of the profit-sharing contract in Bunihurip village, there are several problems including the profit-sharing system which tends to harm the land owner because the price of tea plantation maintenance is fixed but the selling price of tea is decreasing because the demand for tea also drops dramatically but farmers still ask for distribution, as much as 50% of the tea harvest. This happened after the pandemic, where the declining demand for tea caused the harvest schedule which was usually carried out once a week to become uncertain, this was also the cause of the decline in the selling price of tea and changed the system of sharing profit sharing contracts carried out by land owners and farmers, cultivators to 50% of every kilogram of tea that the farmers pick. Therefore, this study aims to determine the suitability between the previous contract and the reality that occurs in the field in terms of the view of Islamic Economic Law.

The implementation of profit sharing contracts in the principles of sharia economic law makes it easier for people who have capital, but do not have skills in maintaining agricultural or plantation land or there are also people who have capital and have expertise, but not all have the time and vice versa. There are also those who cannot make their wealth productive, so Islam encourages to provide capital (funds) to those who need capital for the smooth running of their business. Various types of production sharing contracts in agriculture include muzara'ah, mukhabarah and musaqah. Of the three contracts above, the contract held at the tea plantations of Kampung Bunihurip is the Musaqah contract.

Kampung Bunihurip tea plantation is located in Sukapada Village, Pagerageung District, Tasikmalaya Regency. The tea plantation area of 17 hectares usually produces 6-8 tons of tea per week, but currently they can only harvest a maximum of 3 tons of tea shoots in an indefinite period of time depending on the manufacturer's request. Most of the people in Sukapada Village work as farmers, this is also supported because most of the land in Sukapada Village is Agricultural Land or Productive Land.

The results of this study indicate that the facts in the field about the profit-sharing contract made between the land owner and the sharecropper are in accordance with the rules of the profit-sharing contract according to Sharia Economic Law. The contract carried out in this tea plantation is a musaqah contract, which is where the land owner who already owns the tea plantation asks the cultivators to care for and harvest the tea that the land owner owns.

The distribution of crop yields that have changed since the pandemic period is due to the declining demand for tea which has caused the selling price of tea to fall, this has caused smallholders to want a bigger share than before because the harvest is also uncertain. In this case there is actually no party to blame, but they must be pleased with each other in their work and in giving. The solution that researchers can provide is to utilize tea leaves into local products such as tea chips and marketed directly by the people there, this of course can increase income for both land owners and smallholders.

Keywords: Tea Plantation, Profit Sharing Contract, Covid-19 Pandemic